

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Partai politik merupakan organisasi politik yang dijalankan atas dasar ideologi tertentu yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Partai politik erat hubungannya dengan aktivitas pemerintahan di suatu negara. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia, maka negara menjamin kebebasan bagi warga negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Partisipasi yang dimaksud adalah baik berupa penyampaian aspirasi maupun pembentukan partai politik. Sehingga pada masa Indonesia saat ini, muncul beberapa partai politik baru sebagai bentuk upaya partisipasi dari warga negara. Partai politik baru tentunya menyajikan persaingan yang semakin ketat dalam dunia perpolitikan Indonesia. Salah satu partai baru yang muncul adalah Partai Nasional Demokrat yang didirikan pada 26 Juli 2011. Partai Nasional Demokrat sebagai partai baru memerlukan strategi dalam menyusun kekuatan politik. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam persaingan melawan partai – partai lain yang lebih dulu terbentuk, yang artinya partai – partai yang lebih dulu terbentuk memiliki kekuatan politik yang telah terorganisir baik secara nasional maupun secara kedaerahan. Partai Nasional Demokrat memerlukan upaya untuk mencapai pelembagaan partai secara nasional khususnya dengan melalui daerah – daerah yang ada di Indonesia. Kekuatan politik partai dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari

elit – elit partai yang bergabung sampai strategi dalam memobilisasi massa. Perekrutan elit partai merupakan salah satu tahapan yang sangat penting karena elit partai merupakan pihak – pihak yang paling berpengaruh dalam perkembangan partai politik. Munculnya Partai Nasional Demokrat sebagai partai baru menjadi magnet bagi beberapa pihak untuk masuk menjadi elit dalam partai tersebut. Beberapa pihak baik elit dari partai lain maupun di luar instansi partai mulai masuk dalam Partai Nasional Demokrat dan menduduki posisi/jabatan sebagai elit partai. Salah satunya adalah Anak Agung Ngurah Gede Widiada (merupakan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Denpasar) masuk ke Partai Nasional Demokrat dan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kota Denpasar.<sup>1</sup> Penggabungan kader dari elit partai lain merupakan sebuah fenomena yang menyajikan adanya dinamika politik khususnya pada kepengurusan partai politik. Setiap periode pasti akan selalu dilakukan sirkulasi kepengurusan yang bertujuan untuk regenerasi elit partai politik. Secara umum regenerasi dilakukan pada kader – kader yang dari awal merupakan kader partai tersebut. Namun dalam hal ini kepengurusan partai politik diberikan pada elit yang sebelumnya adalah kader dari partai lain. Kader – kader yang masuk merupakan mantan kader penting/petinggi dari partai yang telah memiliki kekuatan massa yang kuat. Masuknya kader – kader ini menjadi kekuatan bagi partai Nasional Demokrat untuk membangun kekuatannya.

---

<sup>1</sup><http://pelitaonline.com/dinamikapolitisilamadipartaibarupertamadanpenting>. (diakses pada hari minggu, 23 maret 2014. Pukul : 19.15 WIB)

Selain itu adanya beberapa elit yang pernah menjabat dalam pemerintahan yang kemudian bergabung dalam Partai Nasional Demokrat. Nining Indra Saleh yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal DPR dan Siti Nurbaya Bakar yang merupakan mantan Sekjen DPD juga bergabung dengan Partai Nasdem.<sup>2</sup> Dinamika politik yang terjadi pada kepengurusan partai yang dikarenakan masuknya sejumlah kader partai lain. Setiap kader partai yang masuk tentunya memiliki kemampuan berpolitik yang berbeda – beda sehingga hal ini menjadi tolak ukur bagi partai untuk menentukan posisi yang tepat sesuai kemampuan dalam partai tersebut. Kader yang bergabung memiliki pengalaman dan kemampuan yang berbeda – beda. Pengalaman dan kemampuan tersebut menjadi nilai positif bagi kader tersebut sehingga mampu menjadi faktor pendorong dalam menempati posisi strategis dalam partai politik tersebut.

Kemudian Malka Amin dan Mamat Rahayu yang merupakan elit Partai Golkar masuk dan menjadi elit Partai Nasdem.<sup>3</sup> Perpindahan kader dari partai satu ke partai lain merupakan suatu fenomena yang lazim di dunia politik. Beberapa faktor berpengaruh dalam terjadinya fenomena tersebut, salah satunya adalah adanya pengaruh kader senior yang sebelumnya juga telah berpindah. Kader senior dianggap menjadi panutan dari kader – kader yang lebih muda, sehingga ketika kader tersebut memutuskan untuk berpindah

---

<sup>2</sup><http://nasional.kompas.com/read/2013/01/29/16540980/Eks.Sekjen.DPR.dan.DPD.Resmi.Jadi.Politisi.Nasdem> (diakses pada hari sabtu, 22 maret 2014. Pukul : 20.07 WIB).

<sup>3</sup><http://nasional.kompas.com/read/2013/01/24/18103033/OC.Kaligis.dan.43.Aktivis.1998.Masuk.Nasdem>. (diakses pada hari sabtu, 22 maret 2014. Pukul : 20.15 WIB).

partai, maka secara otomatis berpengaruh kepada kader lain. Apalagi didukung dengan munculnya partai baru yang tentunya membutuhkan kekuatan kepengurusan partai yang kuat sehingga tidak sedikit kader – kader dari partai lama berpindah menjadi kader partai baru.

Elit partai yang masuk dalam partai politik berasal dari latarbelakang dan memiliki kemampuan masing – masing di bidangnya. OC Kaligis yang berprofesi sebagai pengacara ikut bergabung dan masuk menjadi elit partai di Partai Nasional Demokrat.<sup>4</sup> Kader partai yang masuk bukan hanya dari kalangan politisi saja, namun terdapat beberapa kader yang basisnya diluar bidang politik. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan bagi partai karena kader – kader yang dimiliki memiliki basis kemampuan yang beragam sehingga hal ini bisa menjadi senjata bagi partai untuk memobilisasi massa dari semua kalangan.

Adanya organisasi sayap yang dibentuk oleh Partai Nasional Demokrat yang meliputi Garda Pemuda Nasdem merupakan bentuk organisasi sayap dari Partai Nasdem yang bertujuan untuk pendekatan pada massa khususnya generasi muda.<sup>5</sup> Dibentuknya Garnita Malahayati yang diklarasikan oleh Partai Nasional Demokrat, organisasi ini berfokus pada kesejahteraan wanita.<sup>6</sup> Kemudian juga dibentuk organisasi Gemuruh (Gerakan Massa Buruh) yang

---

<sup>4</sup><http://nasionalkompas.com/read/Lagi.Dua.Politisi.Golkar.Pindah.ke.Nasdem.Nasdem>. (diakses pada hari sabtu, 22 maret 2014. Pukul : 18.45 WIB)

<sup>5</sup><http://www.beritasatu.com/pemilu-2014/154138-garda-pemuda-nasdem-bertekad-menangkan-partai-nasdem>. (diakses pada hari sabtu, 22 maret 2014. Pukul : 21.04 WIB)

<sup>6</sup><http://ragamwanitaindonesia.blogspot.com.es/2011/12/nasdem-deklarasikan-garda-wanita>. (diakses pada hari jumat, 10 oktober 2014. Pukul : 20.13 WIB)

menghimpun massa buruh.<sup>7</sup> Kemudian terdapat Liga Mahasiswa Nasdem yang merupakan organisasi yang dibentuk sebagai media untuk para mahasiswa yang mendukung Partai Nasional Demokrat, selain itu dibentuk juga Persatuan Petani Nasional Demokrat yang bertujuan untuk menampung pergerakan para petani.<sup>8</sup> Organisasi sayap menjadi salah satu media bagi partai untuk membangun kekuatan politik dan membangun kekuatan massa. Organisasi ini terjun langsung dalam masyarakat untuk menghimpun kekuatan massa.

Kabupaten Nganjuk merupakan daerah dengan nilai budaya yang tinggi. Beberapa periode, Kabupaten Nganjuk merupakan basis kekuatan politik dari salah satu partai besar. Dalam pemilu legislatif tahun 2009, Jumlah partai politik peserta pemilu 2009 sebanyak 38 partai politik, PDIP berada pada posisi 1 dengan mendapatkan kursi sebanyak 9 di anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>7</sup> <http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/09/02/m9oo8x-nasdem-gemuruh-bukann-gerakan-mobilisasi-massa>. (diakses pada hari jumat, 10 oktober 2014. Pukul : 20.37 WIB)

<sup>8</sup> <http://www.gatra.com/pemilu-profile-partai/25519-partai-nasional-demokrat-nasdem>. (diakses pada hari jumat, 10 oktober 2014. Pukul : 21.04 WIB)

**Tabel I. 1.**  
**Perolehan Suara Partai Politik**  
**pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Nganjuk 2009**

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PDIP	9
2	Demokrat	7
3	PKNU	4
4	HANURA	3
5	PKPB	2
6	GERINDRA	2
7	PKS	1
8	PAN	4
9	Partai Kedaulatan	1
10	PKB	6
11	Golkar	5
12	Patriot	5
13	PBR	1

(sumber : arsip data KPU Kabupaten Nganjuk)

Kemudian dalam Pemilu Legislatif tahun 2014, terjadi dinamika perolehan suara, dengan adanya partai peserta pemilu yang berubah. Partai Nasional Demokrat menduduki peringkat ke 6 dalam perolehan suara dengan sebanyak 44.388 atau sebesar 7,21 % dari suara sah keseluruhan. Hal ini membuat Partai Nasional Demokrat memperoleh 4 kursi dari 45 kursi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. 4 kader Partai Nasional Demokrat yang menempati kursi DPRD tersebut adalah H. Yusmanto, SH., dengan perolehan suara sebanyak 4.252, Lilik Sulistyowati, SE., dengan perolehan suara sebanyak 1.636,

R.D.A.K Candrati, S.Sos., dengan perolehan suara sebanyak 4.330, Ratna Wulandari dengan perolehan suara sebanyak 2.387. Dari data Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Nganjuk, perolehan suara terbesar Partai Nasional Demokrat terdapat pada 5 kecamatan yang meliputi Tanjunganom (6.693), Prambon (5.611), Ngronggot (5.097), Bagor (3.402) dan Nganjuk (2.353).

**Tabel I. 2.**  
**Perolehan Suara Partai Politik**  
**pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Nganjuk 2014**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Presentase	Jumlah Kursi
1	NASDEM	44.388	7,21	4
2	PKB	88.881	14,44	6
3	PKS	31.175	5,06	1
4	PDIP	139.987	22,74	11
5	GOLKAR	71.718	11,65	6
6	GERINDRA	88.019	14,30	7
7	DEMOKRAT	58.140	9,44	4
8	PAN	30.170	4,90	1
9	PPP	21.355	3,47	2
10	HANURA	38.190	6,20	3
11	PBB	2.457	0,40	0
12	PKPI	1.179	0,19	0

(sumber : <http://www.kpud-nganjukkab.go.id>)

## 1.2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana upaya Partai Nasional Demokrat dalam mencapai pelebagaan partai di Kabupaten Nganjuk?
- b. Apakah rekrutmen politik yang dilakukan melalui elit organisasi masyarakat menggambarkan pelebagaan partai?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya Partai nasional Demokrat dalam mencapai pelebagaan partai di Kabupaten Nganjuk
- b. Untuk mengetahui pencapaian pelebagaan partai melalui rekrutmen elit organisasi masyarakat.

## 1.4. Manfaat Penelitian

- a. Akademis

Penelitian ini berguna untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis fenomena yang ada dengan menggunakan prespektif teori yang terkait.

- b. Praktis

Penelitian ini sebagai bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait guna untuk mempelajari fenomena - fenomena yang terjadi di dunia politik khususnya mengenai pelebagaan politik Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Nganjuk.



## 1.5. Kerangka Teori dan Konseptualisasi

### 1.5.1. Kerangka Teori

#### Teori Pelembagaan Partai Politik

Partai politik merupakan kelompok otonom dari rakyat yang memiliki tujuan membuat pilihan dan berkontestasi pada pemilihan dengan harapan untuk mendapatkan kekuasaan atas pemerintahan yang ada. Basis sosiologi suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha – usaha untuk memperoleh kekuasaan. Pelembagaan politik menurut Vicky Randall dan Lars Svasand adalah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya.<sup>9</sup> Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand, dalam pelembagaan partai politik terdapat beberapa aspek yang meliputi aspek internal - eksternal dan aspek struktural - kultural. Aspek internal partai yaitu aspek yang berasal dari dalam partai sedangkan aspek eksternal yaitu aspek yang berkaitan dengan hubungan antara partai dan masyarakat serta lembaga lainnya. Aspek struktural yang dimaksud berkaitan dengan struktur yang ada di dalam partai, sedangkan aspek kultural merupakan nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Menurut Vicky Randall, dalam mencapai pelembagaan partai dapat diukur melalui 4 indikator yaitu dimensi kesisteman, dimensi identitas nilai, dimensi otonomi dan dimensi citra publik.

---

<sup>9</sup> Vicky Randall, "Party Institutionalization In New Democracies" dalam Vicky Randall dan Lars Svasand *Party Politics*, Vol 8 Januari No. 1 Tahun 2002. Hlm 11

1. Dimensi kesisteman merupakan persilangan dari aspek internal dan structural. Dalam dimensi ini dijelaskan mengenai fungsi – fungsi partai politik (fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik dan kontrol politik). Indikator terciptanya dimensi ini adalah sistem yang ada di dalam tubuh partai politik berkaitan dengan berjalannya aktivitas partai politik meliputi aktor/elit yang paling dominan dalam internal partai dimana elit yang memiliki pengaruh dominan baik dalam menentukan keputusan maupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan partai politik, kemudian pelaksanaan fungsi – fungsi partai politik menjadi tolak ukur kesisteman dari partai tersebut, pola pelaksanaan dari fungsi rekrutmen, fungsi partisipasi politik, sosialisasi politik, dll menjadi cerminan dari terciptanya dimensi kesisteman, serta sistem yang diterapkan oleh partai politik dalam memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan yang bersifat klientisme atau berdasarkan konstitusi partai.<sup>10</sup>
2. Dimensi identitas nilai (*value infusion*) merupakan hasil dari persilangan aspek internal dengan kultur, dimensi ini berkaitan dengan identitas partai politik yang berdasarkan ideologi partai.

---

<sup>10</sup> Ibid

indikator dari dimensi ini adalah hubungan partai politik berkaitan dengan kelompok tertentu, dalam hal ini ketergantungan partai politik dengan kelompok sosial tertentu. Kemudian pengaruh klientisme dalam organisasi dimana dalam hubungan antara partai dengan anggota bersifat instrumental (didasarkan pada materi) atau bersifat ideologis (berdasarkan ideologi yang diterapkan oleh partai politik).<sup>11</sup>

3. Dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural. Indikator terciptanya dimensi otonomi adalah dalam pembuatan keputusan oleh partai politik berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partaidalam hal ini pengusaha, pemerintah, ormas, dll. Hubungan partai dengan pihak luar ini bersifat saling ketergantungan atau ada salah satu pihak yang mendominasi.<sup>12</sup>

4. Dimensi citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultur. Indikator dari dimensi pengetahuan publik tentang partai politik adalah pada keberadaan partai politik yang ada di tengah publik sudah melekat pengetahuan masyarakat atautakah masyarakat belum mengetahui

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> ibid

partai politik tersebut. Keberadaan partai politik merupakan aspek yang penting dalam pendekatan terhadap masyarakat dan apabila pengetahuan publik terhadap partai politik sudah tercapai maka publik akan menyesuaikan aspirasi dan harapan maupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut.<sup>13</sup>

### 1.5.2. Konseptualisasi

#### a. Partai Politik

Partai politik definisi secara umum merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan ideologi yang dipercaya oleh anggotanya yang memiliki visi, misi dan kepentingan di bidang politik. Keberadaan partai politik dapat dikatakan merupakan keharusan dalam kehidupan berpolitik modern yang demokratis. Secara ideal, partai politik dimaksudkan untuk memobilisasi massa, mewakili kepentingan tertentu, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abash dan damai. Menurut Mark N. Hagopian, partai politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip – prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.<sup>14</sup> Basis

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Amal, Dr. Ichlasul. 1996. *Teori – Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya.

sosiologi suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha – usaha untuk memperoleh kekuasaan. Partai politik yang dalam kinerjanya berkaitan langsung dengan pemerintahan (kekuasaan) dan juga tidak terlepas dari interaksi dengan rakyat. Dari sini tentunya partai politik memiliki fungsi – fungsi yang diantaranya :

1. Fungsi representasi (perwakilan). Dalam fungsi ini partai politik memberikan sarana politik langsung kepada kepentingan yang diwakilinya.
2. Fungsi konversi dan agregasi. Artinya di sini bahwa partai politik menjadi salah satu media transformasi dalam hal kepentingan dan tuntutan yang dirubah menjadi kebijaksanaan dan keputusan.
3. Fungsi integrasi (sosialisasi, partisipasi, mobilisasi), yang di dalamnya terdapat fungsi sosialisasi dimana merupakan proses yang di dalamnya terdapat kumpulan norma – norma sistem politik yang ditransmisikan kepada orang – orang lain. Kemudian mobilisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memasukkan massa(orang)yang sebelumnya berada di luar sistem untuk ke dalam sistem sebagai kekuatan dukungan massa. Partisipasi merupakan kecenderungan dari partai politik untuk bisa mengekspresikan kepentingan.
4. Fungsi persuasi, dalam hal ini fungsi partai sebagai yang berkaitan dengan pembangunan dan pengajuan usulan kebijaksanaan agar memperoleh dukungan dukungan seluas mungkin.

5. Fungsi represi, merupakan fungsi partai politik dalam hal menekan, mengendalikan pihak – pihak baik dalam pemerintahan maupun anggota partai tersebut sebagai tujuan untuk mengontrol dan memobilisasi massa.
6. Fungsi rekrutmen, fungsi partai politik sebagai media untuk menyaring dan mempersiapkan kader – kader sebagai kandidat pemimpin. Dalam rekrutmen kandidat, terdapat 3 proses yaitu certification berdasarkan peraturan yang ada di partai politik, peraturan sosial, dll), nomination (selanjutnya dinilai dengan didasarkan pada pihak atau individu yang memenuhi syarat – syarat atau ketentuan dari partai), election (kemudian dipilih dengan dasar ketentuan tertentu)<sup>15</sup>.
7. Fungsi dukungan, merupakan fungsi partai sebagai organisasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan di sisi lain juga harus menciptakan kondisi – kondisi bagi kestabilan partai dan juga bagi kestabilan sistem.

#### **b. Organisasi Masyarakat**

Organisasi masyarakat erat kaitannya dengan kelompok kepentingan secara umum memiliki pengertian organisasi yang bekerja dilandaskan atas dasar kepentingannya. Dalam hal ini, kelompok kepentingan memiliki tujuan untuk mencapai

---

<sup>15</sup> S. Katz, Richard and William Crotty. 2006. Handbook of Party Politics. London : Sage Publications.

kepentingannya. Kelompok kepentingan pada dasarnya merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat anggota yang disatukan berdasarkan kepentingannya, kepentingan di sini bisa jadi berkaitan dengan pekerjaan, suku, kelas, dll.<sup>16</sup> Berkaitan dengan kelompok, terdapat beberapa fungsi dari kelompok, yaitu :

1. Fungsi Simbolik, kelompok memiliki peran sebagai simbol, artinya di sini bahwa dengan adanya kelompok, dapat dianggap oleh anggotanya bahwa kelompok tersebut mencerminkan kepentingan atau nilai yang dimiliki. Dalam hal ini setiap individu yang ada di dalam kelompok tersebut akan merasa bahwa kelompok tersebut mampu mewakili dirinya yang dalam hal ini memiliki kepentingan untuk selanjutnya bisa menjadi jalan untuk mencapai kepentingannya.
2. Fungsi Ekonomi, dalam hal ini, kelompok kepentingan berfungsi sebagai media untuk memberikan keuntungan di bidang ekonomi/materil. Kelompok kepentingan terbentuk yang juga didasarkan dari berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Dan dalam fungsi ini dijelaskan bahwa setiap individu yang menjadi anggota dalam kelompok kepentingan ini berpikir bahwa kelompok kepentingan ini dapat menjadi media untuk melancarkan bisnis/usaha di bidang ekonomi. Hal

---

<sup>16</sup> Ornstein, Norman J. dan Shirley Elder. 1978. *Interest Groups, Lobbying and Policymaking*. United States : Congressional Quarterly Press.

ini karena kelompok yang terbentuk atas kepentingan tertentu dalam bidang ekonomi, tentunya kinerja kelompok kepentingan tersebut akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Dan individu – individu yang ada di dalamnya berpikir bahwa ini merupakan media untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ekonomi.

3. Fungsi Ideologi, fungsi ini menjelaskan bahwa kelompok yang terbentuk mampu memberikan ideologi dan atau mungkin terbentuk karena ideologi yang sama dari anggotanya. Dalam hal ini ideologi yang dianut/diyakini oleh anggotanya menjadi fondasi yang kuat sebagai tolak ukur berjalannya kelompok tersebut. kelompok yang terbentuk tidak menutup kemungkinan berasal dari berbagai ideologi seperti liberal, konservatif, sosialis, komunis, dll.
4. Fungsi Informasi, pada fungsi ini, kelompok kepentingan menjadi media penyedia substansi informasi atau data bagi para anggota yang ada di dalamnya mengenai isu publik berkaitan dengan fokus kepentingan mereka, mengenai keanggotaan mereka atau mengenai topik lainnya yang masih berhubungan dengan fokus kepentingan mereka.
5. Fungsi Instrumental, Berbicara mengenai kelompok, dalam fungsi – fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya lebih cenderung berbicara mengenai fungsi yang bisa memberikan sesuatu kepada anggotanya, ekonomi, ideologi simbol,



informasi. Namun pada fungsi yang satu ini, fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting, kelompok memiliki peran sebagai alat. Alat di sini memiliki definisi sebagai media yang digunakan untuk mencapai kepentingan dari kelompok tersebut.

- i. Dari beberapa fungsi yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok terbentuk sesuai dengan kepentingan yang mendasarinya tentunya juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kepentingannya tersebut, namun secara umum setiap kelompok memiliki fungsi yang sama, yang membedakannya adalah kepentingannya.

## **1.6. Metode dan Prosedur Penelitian**

### **1.6.1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pelembagaan Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Nganjuk. Pelembagaan yang dilakukan melalui DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk dengan melihat upaya yang dilakukan untuk mencapai pelembagaan partai serta pelembagaan partai melalui proses rekrutmen elit partai.

### **1.6.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian mengenai pelembagaan Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Nganjuk adalah deskriptif – kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas politik yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

### 1.6.3. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini yang telah diwawancarai adalah

- a. Bapak Yusmanto sebagai Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk.
- b. Bapak Prasetyo Uboyo sebagai Sekretaris DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk.
- c. Bapak Handoko Timotius sebagai Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kecamatan Nganjuk dan Sekretaris Garda Pemuda Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk.
- d. Bapak Mariyono sebagai Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kecamatan Bagor.
- e. Bapak Katri Agung Prihati sebagai Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kecamatan Prambon.
- f. Bapak Marsono sebagai Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kecamatan Tanjung anom.
- g. Bapak Setyobudi sebagai Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kecamatan Ngronggot.

#### 1.6.4. Teknik Penentuan Narasumber

Penelitian ini, dalam menentukan narasumber menggunakan teknik purposive. Purposive merupakan teknik penentuan narasumber dimana peneliti telah mengetahui narasumber yang akan diwawancarai sebelumnya. Sehingga ketika melakukan penelitian langsung menuju narasumber yang telah ditentukan.

#### 1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland (1984) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan serta data tambahan seperti dokumen.<sup>17</sup> Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan cara atau teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung secara mendalam dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada subjek penelitian dengan menggunakan bahasa mudah dipahami. Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data sebab memiliki beberapa keunggulan. Wawancara dapat menjadi sarana penghubung informasi jika akses kepada dokumen terbatas. Jika sudah mendapatkan jawaban namun belum memuaskan, peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lanjutan sampai diperoleh data yang memuaskan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus -

---

<sup>17</sup> Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data - data sekunder yang telah ada sebagai sumber acuan dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah meliputi data – data yang berhubungan Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Nganjuk.

#### 1.6.6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data terdapat beberapa tahapan mulai dari sebelum, saat dan setelah pengumpulan data. Menurut B. Miles dan Michael A Huberman, tahanan atau alur kegiatan tersebut terdiri dari reduksi ata, penyajian data dan verifikasi data.<sup>18</sup>

Reduksi data merupakan tahapan dimana dilakukan pemilihan, penyederhanaan dan pengabstrakan yang dilakukan secara terus menerus hingga diperoleh kesimpulan. Kemudian penyajian data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dapat berupa grafik, bagan, dan lainnya. Selanjutnya adalah verifikasi data atau kesimpulan merupakan tahapan untuk menyimpulkan informasi atau data – data yang ada berkaitan dengan penelitian tersebut dengan dasar kebenaran dan validitas.

<sup>18</sup> J. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Baru. Jakarta : UI Press.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan lalu dilanjutkan pada saat peneliti berada di lapangan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan di lapangan. Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. Analisis data diarahkan untuk menentukan fokus penelitian.

Analisis wawancara dilakukan terhadap informasi hasil wawancara. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, hubungan antar kategori dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk - bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.